



Pemkot Tunggu KKS Dari Pusat

● YULIANINGSIH

YOGYAKARTA —Pemerintah pusat menerapkan ujicoba beras miskin (raskin) nontunai di Kota Yogyakarta mulai tahun 2017. Namun sampai kemarin Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk mengakses bantuan itu belum didistribusikan ke daerah. Pemerintah pusat menjanjikan Januari 2017 program raskin nontunai sudah berjalan.

"Sesuai target seharusnya

Januari sudah jalan. Tapi sampai sekarang kartunya belum didistribusikan," kata Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), Hadi Muhtar, Ahad (8/1).

Menurutnya, KKS untuk mengakses raskin nontunai akan didistribusikan pemerintah pusat melalui Dinsosnakertrans, lalu diserahkan ke keluarga penerima raskin. Data terakhir penerima raskin di Kota Yogyakarta sebanyak 16.031 Kepala ke-

uarga (KK). Jumlah itu lama berdasarkan survei BPS tahun 2011. "Kami sudah serahkan data penerima itu ke pusat. Kewenangan mencetak kartu di pemerintah pusat, jadi kami menunggu saja," ujarnya.

Menurutnya, jika ada perubahan data calon penerima raskin nontunai tetap dilakukan melalui musyawarah kelurahan. Hanya bagi penerima yang meninggal, penggantian prioritas dari keluarga terkait misal anak-

nya.

Proses penggantian kartu calon penerima raskin nontunai diupayakan cepat karena tahun ada sistem data yang terintegrasi antara pusat dan daerah. "Kami diberikan kewenangan untuk membuka sistem data, dan mengusulkan penggantian data. Namun tetap yang mencetak pusat kartunya," katanya.

Selama ini Raskin diberikan berupa beras dengan uang tebusan tertentu. Raskin nontunai

diberikan senilai Rp 110.000 per bulan dalam simpanan rekening bank yang diakses dengan KKS. Kartu itu bisa untuk membeli beras maupun kebutuhan lainnya melalui layanan elektronik Warung (e-warung) Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama (Kube) Program Keluarga Harapan (PKH). Penggunaan KKS di e-warung dilakukan dengan menggesek kartu pada alat Electronic Data Capture (EDC).

Rencananya satu kecamatan

ada satu e-warung, kecuali Umbulharjo ada dua e-warung. Persiapan e-warung itu telah dilakukan. Hadi menyatakan dalam pendirian e-warung ada dana dari pusat sekitar Rp 30 juta mendukung operasional. Dana itu untuk untuk rehabilitasi e-warung, penyediaan sarana pendukung seperti rak dan modal untuk barang kebutuhan dari Bulog. "Saat ini sedang proses pengajuan dana itu," ujarnya.

■ ed: fernan rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 September 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005